EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI MADRASAH ALIYAH AL HUDA PANGKALAN SUSU

Khairani Nasution

Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371
khairaninasution935@gmail.com

Makmur Syukri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371
makmursyukri@uinsu.ac.id

Syafaruddin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371
syafaruddin@uinsu.ac.id

Abstrak: *The purpose of conducting research at Madrasah Aliyah Al-Huda Pangkalan Susu is to determine the results of the evaluation of madrasah-based curriculum policies using the principles of effectiveness, efficiency, adequacy, equity and responsiveness and accuracy. evaluation must continue to be carried out in order to improve program content, implementation and evaluation itself towards future curriculum innovationsThis research is a qualitative research. Data collection techniques are carried out by interview, observation, document review. The results of the study indicate that the development of a madrasah-based curriculum at Madrasah Aliyah Nurul Huda has not been optimal due to the lack of facilities and infrastructure. Researchers suggest that teachers can still be creative and innovate even with limited facilities and infrastructure because the current independent curriculum development policy implies that teachers are able to teach freely. by optimizing one's own abilities and being able to be creative without limits so that they are able to explore and explore students' abilities so as to overcome and solve life's problems and be able to compete and exist in the world of work later.*

Keywords: *Evaluation, Policy, Curriculum Depelovment.*

Pendahuluan

Mencerdaskan Kehidupan bangsa merupakan amanat dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjamin pendidikan bagi warganya. Pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas anak Indonesia. Kebijakan Pengembangan kurikulum merupakan instrumen

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum merupakan arah yang terencana terhadap kebijakan. Kebijakan pendidikan yang benar akan terlihat melalui implementasi kurikulum yang diterapkan karena kurikulum merupakan inti atau pusatnya pendidikan. Sering kita mendengar dengan "ganti menteri ganti kurikulum". Namun jika kita melihat perkembangan zaman yang begitu cepat, karakteristik dan kebutuhan peserta didik maka pergantian kurikulum merupakan suatu keniscayaan. Kebijakan pemerintah untuk melakukan pergantian kurikulum dilakukan sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 kemudian tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta, kurikulum 2013 dan saat ini sedang diterapkan kurikulum merdeka di sekolah penggerak untuk kelas 1,2, 4 dan 5, sedangkan yang bukan sekolah penggerak saat ini diberikan pilihan untuk menerapkan kurikulum 13, kurikulum darurat atau kurikulum merdeka.

Pergantian kurikulum yang terjadi saat ini tujuan utamanya adalah untuk pemulihan pembelajaran dari krisis pembelajaran yang dialami peserta didik akibat pandemi dari maret 2019 yang awalnya disebut kurikulum prototype namun terus berkembang menjadi kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum juga dipengaruhi oleh hasil evaluasi dari setiap kebijakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai perencanaan dan apakah dampak kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sukardi menegaskan tujuan dilakukannya evaluasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.[1]

Kajian artikel ini dibuat peneliti adalah untuk mengetahui pentingnya evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum agar dapat memperbaiki isi

[1] Sukardi, H.M Evaluasi Pendidikan: Prinsip & Operasionalnya. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 11.

program, pelaksanaan dan evaluasi itu sendiri agar dapat berinovasi kurikulum yang akan datang. Longstreet dan Shane mengemukakan defenisi evaluasi "*evaluating is judging the success and merit of an undertaking*"[2] yang berarti evaluasi adalah menilai keberhasilan dan manfaat dari suatu usaha Pelaksanaan evaluasi harus dilaksanakan dengan berkelanjutan dan konsisten untuk mempermudah guru dan siswa melaksanakan proses pembalajaran agar tercapai tujuan yang ditetapkan.

Kajian Teori

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 19 menjelaskan pengertian kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran sera cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiaytan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan dari kurikulum darurat yang khusus diluncurkan agar dapat merespon dampak pandemi covid 19. Kurikulum darurat menjadi kurikulum prototype yang diterapkan di sekolah penggerak dan setelah melihat perkembangan digitalisasi dan kebutuhan siswa maka kurikulum merdekan disempurnakan untuk menjadi kurikulum yang dapat diterapkan di seluruh sekolah/madrasah nantinya yang ada di Indonesia. Dua hal pokok yang harus disiapkan oleh pihak madrasah, yaitu kesiapan materil (sumber daya alamiah sekolah) dan non materil (sumber daya manusia sekolah). Bentuk kesiapan materil sekolah dapat dilihat dari dimensi perangkat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, keuangan, dan lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial. Sedangkan bentuk kesiapan non materil sekolah dapat dilihat dari dimensi kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua.[3]

[2] Longstreet, W.S dan H.G. Shane *Curriculum for a new millennium*. (Boston: Allyn and Bacon, 1993), h.143.

[3] Sosilo, Muhammad Joko *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 180-191.

Dwijowijoto menegaskan fungsi evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi,[4] yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Dengan dilakukan evaluasi dapat diketahui realita pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengindetifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi kinerja kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau output, jangka panjang atau outcome. Evaluasi kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terahadap:

1. Pencapain target (*output*);
2. Pencapai tujuan kebijakan (*outcome*);
3. Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian;
4. Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sama di tempat lain yang berhasil.
5. Indentifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan publik yaitu:[5] (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara

[4] Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara- Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi).* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 463.

[5] Putra, Fadillah. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 93.

keseluruhan dapat berlangsung secara baik. Fungsi evaluasi dibagi menjadi fungsi pormatif dan fungsi sumatif.[6] Fungsi formatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum (curriculum improvement). Fungsi formatif suatu evaluasi kurikulum hanya dapat dilaksanakan ketika evaluasi itu berkenaan dengan proses dan bukan berfokus pada hasil. Sedangkan fungsi sumatif adalah fungsi kurikulum untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Hasil pengembangan kurikulum dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar ataupun dampak kurikulum terhadap sekolah dan masyarakat. Berdasarkan fungsi sumatif ini maka evaluator dapat memberikan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dilanjutkan keberhasilannya dan masih dianggap relevan dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat atau suatu kurikulum harus diganti karena kegagalan dan ketidaksesuaian dengan tuntutan masyarakat.

Kegiatan evaluasi kebijakan diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal dan eksternal.

1. Dimensi bersifat internal, antara lain

Adapun dimensi bersifat internal, antara lain yaitu:[7]

a. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
b. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
c. Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (guarantee to non-recurrence). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

2. Dimensi bersifat eksternal

[6] Hasan, *Evaluasi Kurikulum.* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), h. 46-49.
[7] *Ibid.*, h. 50.

Adapun dimensi bersifat eksternal:

a. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
b. Untuk mengsosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur. Fokus permasalahan terkait dengan evaluasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berjalan kurang optimal meski telah ada landasan untuk penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikian publik. William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

1) Efektifitas (*effectiveness*)

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

2) Efisiensi (*efficiency*)

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3) Kecukupan (*adequacy*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4) Perataan (*equity*)

Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitukeadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.

5) Responsivitas (*responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6) Ketepatan (*appropriateness*)

Kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Kebijakan yang menjadi faktor penelitian ini adalah menilai bagaimana pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Al Huda Pangkalan Susu, Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh tim pengembang kurikulum adalah agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis menyesuaikan diri dengan peserta didik. Evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum dilakukan

agar struktur kurikulum dan model pembelajaran mendorong siswa lebih aktif

Kriteria yang digunakan untuk mengkaji evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, digambarkan sebagaimana pada table berikut:[8]

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara purposive dan jumlah informan terpilih sebanyak lima (5) orang. Penelitian di lakukan di Madrasah Aliyah Nurul Huda Pangkalan Susu. Proses pengambilan dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan terpilih serta dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan maka data diperoleh dari dua sumber, yakni (a) data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian

[8] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003), h. 610.

dengan jenis pertanyaan yang mengarah pada enam variabel model evaluasi kebijakan William N Dunn dan hasil observasi, (b) data sekunder berasal dari Tata usaha Madrasah Aliyah Al Huda Pangkalan Susu atau lembaga/instansi lain yang terkait terutama yang menyangkut tentang dokumen, peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan penyusunan satuan atau editing data, kategorisasi atau pengelompokan data, interprestasi atau penafsiran makna data, dan penarikan kesimpulan sertasaran-saran hasil penelitian.

Temuan dan Pembahasan

Efektifitas

Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan semakin mendekati sasaran, berarti mungkin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap efektifivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/ tujuan kebijakan. Efektivitas pada evaluasi kebijakan yang dimaksud yaitu pencapaian hasil dari penerapan kurikulum 13 yang dilihat dari ketepatan waktu kesesuaian hasil dengan tujuan yang diinginkan. Seorang informan menjelaskan jika selama pandemic covid 19 menggunakan kurikulum darurat karena siswa hanya diajarkan materi esensial saja.

Tahun Pelajaran 2022/2023 akan diterapkan kurikulum merdeka, untuk itu madrasah harus mengenal dan mempersiapkan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan kurikulum merdeka dan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan orangtua siswa. Peneliti berpendapat agar kinerja kebijakan pengembangan kurikulum di Madarsah Aliyah Al Huda Pangkalan Susu dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan Kurikulum:

1. Perlunya pemahaman mengenai kurikulum merdeka secara komprehensif
2. Kesadaran guru untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran
3. Kesediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kurikulum merdeka

Efisiensi

William N Dunn mengemukakan: "Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien".[9]

Penerapan Kurikulum kurang didukung dengan ketersediaan sumber daya dan yang memadai. Peneliti berpendapat bahwa untuk melaksanakan kegiatan apapun agar tercapai hasil yang diharapkan maka harus didukung dana yang memadai. Demikian pula halnya dalam penerapan. Karena dana merupakan salah satu sumber daya yang harus ada dalam penerapan manajemen. Tanpa ada dukungan dana maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan optimal.

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah .[10] Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dari hasil penelitian terbukti bahwa kurikulum 13 yang diterapkan di Madrasah Aliyah Al Huda Pangkalan Susu dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang signifikan terutama dalam proses pembelajaran dan juga dukungan dari pemerintah yang harus siap dalam memberikan kebutuhan seperti buku pelajaran yang bisa dipakai oleh setiap siswa dalam proses pembelajaran. Maka hendaknya pihak terkait baik pemerintah daerah (eksekutif), maupun pihak lain yang terkait perlu melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut.

[9] *Ibid.*, h. 430.
[10] *Ibid.*

Perataan

Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan 6ltern.William N. Dunn menyatakan bahwa kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terbukti bahwa penerapan kurikulum di Madrasah Aliyah AlHuda Pangkalan Susu sudah dilaksanakan secara maksimal namun masih ada kendala di kesiapan sekolah untuk menyediakan sarana penunjang bagi siswa. Penerapan kebijakan kurikulum dan keberhasilan suatu program kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa itu sendiri.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan alternatif adalah sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan alternatif atas penerapan suatu kebijakan. William N. Dunn mengemukakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu.[11] Pendapat di atas membuktikan bahwa implementasi kurikulum mendapat respon yang sangat baik dari pihak sekolah dan dukungan positif dari semua pihak termasuk yang terlibat dalam proses pembelajaran. Peneliti berpendapat bahwa respon dari setiap yang terlibat dalam proses pembelajaran sudah terlaksana dengan baik hanya saja ada beberapa hal yang harus di lengkapi oleh para pembuat kebijakan yaitu memperhatikan setiap kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang dikeluarkan dan memberikan saran dan support.

[11] *Ibid.,* h. 437.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah: "Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternativ yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas alternative, karena alternat ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau alternativ untuk merealisasikan tujuan tersebut". [12]Artinya ketepatan dapat diisi oleh keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun dimungkinkan alternativ lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Kesimpulan

Evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Al Huda Pangkalan Susu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal hal ini di tunjukkan dengan kesiapan sumber daya di setiap satuan pendidikan belum merata dan kurikulum belum sepenuhnya berpusat pada siswa dalam proses pembelajaran, belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kurikulum 13. Perlu Diadakan sosoalisasi, workshop untuk mengetahui kurikulum yang baru akan diterapkan agar maksimal agar seluruh warga sekolah memahami secara komprehensif terhadap guru baik konsep, penyusunan kurikulum maupun implementasi dilapangan dan di perlukan dukungan dari berbagai pihak untuk melengkapi sarana dan sarana prasarana.

Daftara Pustaka

Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara- Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia. 2011.

Dunn. N, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003

[12] *Ibid*., h. 499.

Longstreet, W.S dan H.G. Shane. *Curriculum for a new millennium*. Boston: Allyn and Bacon.1993.

Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Disempurnakan: Pengembangan Standar Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia. 2006.

Munandar, A. *Kurikulum sebagai jantung pendidikan, Prosiding Seminar Nasional Pendidik dan Pengembang Pendidikan Indonesia*. 2017 IKIP Mataram 14 Oktober 2017. Diakses dari http://ejournal mandalanursa. org/indekx. php/semnas/article/view/298.

Putra, Fadillah. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003.

Sosilo, Muhammad Joko. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Sukardi, H.M Evaluasi Pendidikan: Prinsip & Operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Undung- Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan.